

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur

- Ali Safa'at, Muchamad. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chaidir, Ellydar. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2007.
- Fajar, Mukti. *Sang Pengembala, Perjalanan Hidup Dan Pemikiran Hukum A. Mukti Fajar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Firmansyah Arifin, dkk. *Hukum Dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1986.
- Harmaily, Moh., and Kusnardi Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.
- Isharyanto. *Partai Politik, Ideologi, Dan Kekuasaan*. I. Yogyakarta: CV Absolute Media, 2017.
- Isrok, and Dhia Al Uyun. *Ilmu Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Pers, n.d.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2nd ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- . *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Edited by Soemardi. Jakarta: Bee Media, 2007.
- Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. 3rd ed. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Manggalatung, H.A Salman. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Munaf, Yusri. "Konstitusi Dan Kelembagaan Negara." *Konstitusi Dan*

*Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014.

Nurul Huda. “Buku Hukum Lembaga Negara.” Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Padmo Wahyono. *Ilmu Negera*. Jakarta: Ind Hill Co, 2003.

Rachman, Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

### **Jurnal Ilmiah**

21211006, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN TESANO S H A. “Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2015).

Agus Nurulsyam Suparman. “Partai Politik Dan Kaderisasi (Membentuk Partai Politik Yang Berkualitas Sesuai Dengan Tuntutan Demokrasi).” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2017): 200–216. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1031>.

Ali Safa’at, Muchamad. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ar, Oleh Suhariyono. “Peraturan Menteri” 1, no. September (2004): 119–128.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Bungaran, M. Maulana. “Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis Dan Penegakan Etika Wakil Rakyat.” *Seminar Nasional Mahkamah Dewan Kehormatan DPR RI: Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan*, no. 2 (2011).

Chaidir, Ellydar. *Hukum Dan Teori Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2007.

Dahlan, D M. “Peningkatan Peran Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Paradigma Baru Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ....” *Jurnal Hukum Responsif* (2019): 40–53. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/731>.

Dkk, Arifin Firmansyah. *Hukum Dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Edited by 1. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2004.

Efriza, NFN. “Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception].” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 10, no. 1 (2019): 17–38.

Fajar, Mukti. *Sang Pengembala, Perjalanan Hidup Dan Pemikiran Hukum A. Mukti Fajar (Hakim Konstitusi Periode 2003-2008)*. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005.

Firdaus. “Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau Dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945.” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 3 (2017).

Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1986.

Harmaily, Moh., and Kusnardi Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, 1988.

Hendrarto. “Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mencetak Kader Pemimpin.” *Jurnal Penelitian Inovasi*, 2006.

Huda, Ni. “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial” 28, no. 3 (2021): 550–571.

Isharyanto. *Partai Politik, Ideologi, Dan Kekuasaan*. I. Yogyakarta: CV Absolute Media, 2017.

Ismet, Ma'mun, and Tihara Sito Sekar Vetri. *Layanan Badan Hukum Partai Politik Sebagai Implementasi Layanan Prima*. 1st ed. Depok: BPSDM Kumham Press, 2020.

Isrok, and Dhia Al Uyun. *Ilmu Negara*. Malang: Universitas Brawijaya Pers, n.d.

Jamaluddin, Jamaluddin. “Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8 (May 12, 2020): 29.

Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 2nd ed. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

———. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Kadir, A. Gau. “Dinamika Partai Poitik Di Indonesia.” *Sosiohumaniora* 16, no. 2

(2014): 132–136.  
<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/5724/3037>.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Edited by Soemardi. Jakarta: Bee Media, 2007.

Mahmudi, Mohammad. “Partai Politik Sebagai Badan Hukum Dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia.” *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 17.

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*. 3rd ed. Yogyakarta: UII Press, 2006.

Manggalatung, H.A Salman. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.

Munaf, Yusri. “Konstitusi Dan Kelembagaan Negara.” *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2014.

Nurul Huda. “Buku Hukum Lembaga Negara.” Bandung: PT Refika Aditama, 2020.

Padmo Wahyono. *Ilmu Negera*. Jakarta: Ind Hill Co, 2003.

Rachman, Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

Rahmi, Syukri. “Kedudukan Dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia.” *Islam Transformatif: Journal Of Islamic Studies* 01 (2017).

Ramadhanti, Rika. “Partai Politik Dan Demokrasi.” *Demokrasi dan Otonomi Daerah* (2018): 251–256.

Riau, Syarif Kasim. “Eksistensi Partai Politik Dan Pemilihan Langsung” 9, no. 1 (2012): 59–80.

Rosana, Ellya. “Partai Politik Dan Pembangunan Politik.” *TAPIS* 8 (2012).

Pemerintah Kota Jambi. “Kedudukan Peraturan Menteri Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah” 4, no. 1 (2016): 1–23.

Sugiya, Aritasius, Bambang Setiawan, Sultani, and Dkk. *Partai-Partai Politik Indonesia Ideologi Dan Program 2004-2009*. Edited by Bambang Setiawan and Bestian Nainggolan. Jakarta: Kompas, 2004.

Sulistiyo, A. P. “Problematika Hukum Terhadap Kedudukan Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Yayasan” (2017).

Suriadinata, Vincent. “Asas Presumptio Iustae Causa Dalam KTUN: Penundaan

Pelaksanaan Ktun Oleh Hakim Peradilan Umum.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 139–152.

Thohir, Muhammad. “Dinamika Partai Politik Indonesia Untuk Membangun Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis.” *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2017): 145–154.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (TAP MPR)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Komisi Nasional HAM

Undang-Undang No. 10 Tahun 1999 tentang KPPU

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Bank Sentral

Undang-Undang No. 31 Tahun 2022 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Penetapan Presiden No. 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat Dan Penyederhanaan Kepartaian

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat

### **Laporan Penelitian, Skripsi dan Tesis**

21211006, Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNTAN TESANO S H A. “Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Nestor Magister Hukum 2*, no. 2 (2015).

Bungaran, M. Maulana. “Penguatan Mahkamah Partai Politik Dalam Peningkatan Kualitas Perilaku Etis Dan Penegakan Etika Wakil Rakyat.” *Seminar Nasional Mahkamah Dewan Kehormatan DPR RI: Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan*, no. 2 (2011).

Ismet, Ma'mun, and Tihara Sito Sekar Vetri. *Layanan Badan Hukum Partai Politik Sebagai Implementasi Layanan Prima*. 1st ed. Depok: BPSDM Kumham Press, 2020.

### **Media Online**

Azhari, Al. “Moeldoko Ketum Partai Demokrat 2021-2025 Versi KLB Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Jumat 5 Maret 2021.” *BeritaSubang.Com*. Accessed May 22, 2022. <https://beritasubang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1331541820/moeldoko-ketum-partai-demokrat-2021-2025-versi-klb-hotel-the-hill-sibolangit-deli-serdang-jumat-5-maret-2021>.

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama. “Pemerintah Resmi Tolak KLB Demokrat Deli Serdang.” *Website Resmi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI*. Last modified 2021. Accessed November 15, 2021. <https://www.kemenkumham.go.id/berita/kemenkumham-resmi-tolak-klb-demokrat-deli-serdang>.

Demokrat, DPP Partai. “Timeline Sejarah Partai Demokrat.” *Laman Resmi Partai Demokrat*. Accessed March 20, 2022. <https://www.demokrat.or.id/sejarah/>.

Indrawan, Angga. “Muladi Ingatkan Menkumham Soal Pengesahan Golkar.” *Republika.Co.Id*. Accessed May 1, 2022. <https://republika.co.id/berita/nkot1q/muladi-ingatkan-menkumham-soal-pengesahan-golkar>.

Pusat Data, Informasi dan Teknologi. "Profil Pejabat." Last modified 2014. Accessed May 13, 2022. <https://kemenkumham.go.id/profil/profil-pejabat>.

———. "Sejarah Kementerian Hukum Dan HAM." Last modified 2016. Accessed May 14, 2022. <https://kemenkumham.go.id/profil/sejarah>.

Mawangi, Genta Tenri. "AHY Datang Ke Kemenkumham Diterima Dirjen AHU." *AntaraNews.Com*. Accessed February 15, 2022. <https://www.antaraneews.com/berita/2030925/ahy-datang-ke-kemenkumham-diterima-dirjen-ahu>.

Muhammad Genantan Saputra. "Jhoni Allen Marbun Gugat AHY Rp55,8 Miliar." *Merdeka.Com*. Accessed May 20, 2022. <https://www.merdeka.com/politik/jhoni-allen-marbun-gugat-ahy-rp558-miliar.html>.

Prastiwi, Devira. "6 Hal Terkait Partai Demokrat Pecat Ketujuh Kadernya." *Liputan 6*. Accessed May 20, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4494598/6-hal-terkait-partai-demokrat-pecat-ketujuh-kadernya>.

Ramadhan, Ardito. "Isu Kudeta Di Demokrat Yang Berujung Pemecatan." *Kompas.Com*. Accessed May 12, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/01/07453731/isu-kudeta-di-demokrat-yang-berujung-pemecatan-7-kader?page=all>.

———. "Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas." *Kompas.Com*. Accessed April 30, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/08/13273621/serahkan-berkas-ahy-yakin-kemenkumham-masih-punya-integritas>.

Rika, Hesti. "AHY: KLB Di Sumut Ilegal Dan Inkonstitusional." *CNN Indonesia*. Accessed May 20, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210305164433-32-614296/ahy-klb-di-sumut-ilegal-dan-inkonstitusional>.

Satriawan, Iwan. "Dari Klaim Kepemimpinan Hingga Saling Laporan." *BangkaPos.Com*. Last modified 2021. Accessed September 1, 2021. <https://bangka.tribunnews.com/2021/03/10/dari-klaim-kepemimpinan-hingga-saling-lapor-ini-kronologi-konflik-di-partai-demokrat>.

Bagian Humas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. "Struktur Organisasi Direktorat Tata Negara." *Laman Resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*. Accessed April 20, 2022. [https://portal.ahu.go.id/site/struktur\\_organisasi/tatanegara](https://portal.ahu.go.id/site/struktur_organisasi/tatanegara).

Wicaksono, Adhi. "Yasonna Minta Demokrat Moeldoko Lengkapi Berkas

Permohonan.” *CNN Indonesia*. Accessed June 1, 2022.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210321103845-32-620110/yasonna-minta-demokrat-moeldoko-lengkapi-berkas-permohonan>.

